TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG

REVIEW OF EFFECTIVITY PARKING TAX AND ITS CONTRIBUTION IN INCREASE REAL DISTRICT INCOME AT DISTRICT INCOME AND MANAGE FINANCES DEPARTMENT BANDUNG REGENCY

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Jenjang Studi Diploma III Program Studi Akuntansi

Disusun oleh :

Dewi Sufraeni

21307009

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
BANDUNG
2010

ABSTRAK

Dalam setiap kegiatannya, instansi pemerintah tidak terlepas dari pengenaan pajak. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung. Berdasarkan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah adalah salah satunya pajak parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir. Namun pada kenyataanya target yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi sebenarnya dan ketidakseimbangan antara potensi dengan realisasi penerimaan pajak parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui efektivitas pajak parkir dan PAD (2) mengetahui kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD (3) mengetahui hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak parkir dan PAD (4) mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir dan PAD.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data yang digunakan adalah Realisasi Pajak Parkir, Realisasi PAD dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD periode tahun 2005-2009. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun target penerimaan pajak parkir selalu naik dan diiringi dengan tercapainya realisasi yang mampu melebihi target yang direncanakan. Naik dan turunnya kontribusi pajak parkir di pengaruhi oleh banyak atau sedikitnya penyediaan lahan parkir, kesadaran wajib pajak yang meningkat dan bertambahnya objek pajak parkir.

Kata Kunci : Perpajakan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

In every activity, a public entity is not separable from tax. Region tax that is obliged contribution that would be conducted by personal people or organizational to region without balance. Based on ordinance, to used for perform expense Region Government and Region Development. Which is one of region tax is parking tax that is perform of tax parking. However target isn't appropriate with potential and potential isn't balance with realization revenue parking tax. As for intention of research that is (1) to know effectivity parking tax and real district income (2) to know contribution parking tax in increase real district income (3) to know obstacle was happen on revenue of parking tax and real district income (4)to know efforts for parking tax in increase real district income at district income and manage finances department.

The research method is descriptive method qualitative approach is data in type of words, sentences, and graphic. Data used is the Actual Tax Revenues Original Parking period of the year 2005-2009. Technique data collecting taken is the Field Research with interview and observation.

Results from this study indicate that every year tax revenue target of raising and publicity is always accompanied by the realization that could exceed the achievement of planned targets. Rise and fall of parking tax contribution is influenced by many or little supplying of parking area, aware of obligation tax always rise and more object of parking tax at Bandung regency.

Keyword : Taxation, Parking Tax, Real District Income

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. (Meutia Fatchanie:2007). Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah.

Dimana Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:46). Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung adalah Pajak Parkir yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.

Objek Pajak Parkir diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Ganda:2010). Namun pada kenyataannya, objek pajak parkir yang diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk menambah pendapatan asli daerah justru tidak mencapai target. Terbukti pada target PAD tahun 2008 sebesar Rp 152.407 miliar terrealisasi Rp 147.631 miliar, atau 96,8% dan target PAD dari hasil pajak daerah, Rp 62.716 miliar, terrealisasi Rp 54.391 miliar. Pajak daerah mencakup tujuh item, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan galian C, dan pajak parkir. (Pikiran Rakyat, 8 April 2008). Dari fenomena secara umum diatas menunjukan bahwa masih banyak sekali potensi pajak parkir

yang belum terealisasikan yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal.

Selanjutnya penulis paparkan mengenai fenomena khusus yaitu terdapatnya target pajak parkir dan pendapatan asli daeah yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupaun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan dan belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan dan masih terbatasnya penyedia lahan parkir. (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, 2010). Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah melalui Pajak Parkir sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara mensosialilsasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak parkir agar setiap wajib pajak mengerti, memahami serta melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak parkir.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengambil judul **“Tinjauan Atas Efektivitas Pajak Parkir Dan Konribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana efekitivitas pajak parkir dan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerimaan pajak parkir dan penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dalam meningkatkan panerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir dan penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dalam meningkatkan panerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dapat menambah pengetahuan, mendapat wawasan pembanding yang baik mengenai efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah serta dapat mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pajak parkir itu sendiri.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak akan membutuhkannya mengenai efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan daerah.

3. Bagi Ilmu Akuntansi

   Diharapkan dapat mengetahui efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan daerah yang saling berhubungan dengan Perpajakan khususnya Pajak Daerah. Mata kuliah yang terkait yaitu Perpajakan dan Akuntansi Sektor Publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Instansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

   Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mengenai keberadaan sektor pajak parkir yang sangat potensial untuk dipungut.

2. Bagian Pendapatan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perkembangan pajak parkir juga pendapatan asli daerah, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi para wajib pajak parkir dalam pembayaran perpajakannya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, akan dijelaskan mengenai pengertian pajak, pengertian pajak daerah, pajak parkir, pendapatan asli daerah dan seterusnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Pemerintah kepada rakyat yang sifatnya bisa dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Pengetian pajak menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**
>
> **(2010:1)**

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara (dapat dipaksakan) berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang berlangsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.2 Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mendefinisikan bahwa pajak daerah :

> **"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**
>
> **(2009:28)**

Dari definisi diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan UU dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

2.1.3 Pajak Parkir

Adapun pengertian pajak parkir menurut **Marihot P. Siahaan** adalah :

> **"Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran."**
>
> **(2005:407)**

Berdasarkan uraian diatas, pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **Djamu Kertabudi** menyatakan bahwa :

> **"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."**
>
> **(2007:2)**

Dari definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi daerah dalam wilayahnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Didalam suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam suatu instansi dikarenakan pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.

Dimana pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** dan **Ely Suhayati** menyatakan bahwa :

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat**

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

(2010:1)

Seperti yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah. Dimana pengertian PAD menurut **Djamu Kertabudi** adalah :

"Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang."

(2007:2)

Semua PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pajak daerah. Pengertian pajak daerah dalam buku UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah :

"Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

(2009:28)

Sumber pajak daerah yaitu salah satunya adalah pajak parkir. Adapun pengertian pajak parkir menurut **Marihot P. Siahaan** menyatakan :

"Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran."

(2005:407)

Dari kesimpulan diatas menunjukan bahwa pajak parkir ini menunjukan kemampuan asli daerah untuk memudahkan bagi Pemerintah Daerah melakukan pembangunan diberbagai sektor didalamnya. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak parkir. Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pada gambar 2.1

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan pendapat **Sugiyono** yang mendefinisikan :

> **"Objek Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."**
>
> **(2009:38)**

Berdasarkan uraian diatas, objek dalam penelitian ini adalah efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

3.2 Metode Penelitian

Definisi metode penelitian menurut **Sugiyono** menyatakan bahwa :

> **"Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisifikasi masalah. "**
>
> **(2009:2)**

Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematik. Rasional berarti kegiatan penelitian penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah yang bersifat logis.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung untuk kemudian di analisa dan dibuat kesimpulan.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut **Nur Indriantoro dan Bambang Supomo** adalah :

“Desain Penelitian adalah prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data secara keseluruhan.”

(2002:10)

Dari pemaparan diatas maka dikatakan bahwa desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara memilih, mengumpulkan dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut **Nur Indriantoro dan Bambang Supomo** adalah sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan

   Studi pendahuluan merupakan tahap awal dalam penelitian ini, di mana dalam tahap ini peneliti mencari referensi untuk menetapkan judul penelitian, yaitu Tinjauan atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan membaca berbagai teori yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, juga membandingkannya dengan penelitian yang telah ada.

2. Perumusan Masalah dan Penentuan Tujuan Penelitian

   Perumusan masalah merupakan upaya yang dilakukan untuk merumuskan keadaan yang ada secara sistematis berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Seperti yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan untuk pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Pengumpulan Data

   Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi ke perusahaan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dipakai adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Menurut waktu pengumpulannya data bersifat *time series* data atau data deret waktu yang merupakan hasil pengamatan suatu periode tertentu (bulanan, triwulan, atau tahunan).

4. Pengolahan Data

   Berdasarkan data-data yang telah terkumpul, terutama data mengenai pajak parkir, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi pajak parkir dan pendapatan asli daerah. Data yang diperoleh akan diolah lebih lanjut untuk keperluan perhitungan statistik, dengan menggunakan program aplikasi, yaitu Microsoft Excel. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan penulis dalam pengolahan data dan pengujian statistik.

5. Kesimpulan dan Saran

   Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan yang diambil dari uraian-uraian yang ada pada bab pembahasan. Selanjutnya juga akan disampaikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan yang diteliti.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul tugas akhir yang diambil yaitu tinjauan atas efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, ada 1 variabel yaitu Variabel Independen (Variabel X).

Pengertian variabel menurut **Sugiyono** menyatakan bahwa :

"Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen (terikat)."

(2009:39)

Dari pemeparan diatas variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau penyebab perubahan pada variabel tak bebas. Data yang menjadi variabel bebas adalah efektivitas pajak parkir. Variabel, indikator, skala pengukuran yang digunakan baik untuk variabel X dalam penelitian ini dapat dilihat tabel 3.1 :

3.2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis menggunakan :

1. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram serta segala informasi yang berasal dari literature yang ada hubungannya dengan teori-teori mengenai topik penelitian. Dimana data yang dipakai adalah data laporan realisasi penerimaan pajak parkir, pendapatan asli daerah dan pajak daerah.

3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti dengan menggunakan beberapa pendekatan teknik yang diperlukan, diantaranya adalah :

1. Studi Lapangan (*field research*)

   Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :

   a. Metode Observasi atau Pengamatan

      Tinjauan atas efektivitas pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang telah ada dari segi observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan bidang pendapatan pada DPPK Kab. Bandung.

   b. Metode *Interview* atau Wawancara

      Interview atau wawancara dilakukan langsung dengan Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kab. Bandung. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir yang sedang disusun penulis.

   c. Dokumentasi

      Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari DPPK Kab. Bandung yaitu data laporan realisasi penerimaan pajak parkir, pendapatan asli daerah dan pajak daerah.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literatur, buku teks, dan catatan kuliah, dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan pajak parkir dan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari bagian pengendalian dan juga dari bagian pajak parkir. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

4.1.2 Efektivitas Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir termasuk kepada daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak parkir terhadap PAD dapat dilihat melalui penerimaan pajak parkir dan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) serta kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Terlihat seperti pada tabel 4.1

Adapun data mengenai penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung selama tahun anggaran 2005-2009. Terlihat seperti pada tabel 4.2

4.1.3 Kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dibawah ini akan ditampilkan tabel 4.3 tentang kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dimana setiap kontribusi pajak parkir dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak parkir mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

4.1.4 Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kab Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya target pajak parkir dan PAD yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.
2. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupun realisasi pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.
3. Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan.
4. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.

4.1.5 Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah daerah harus melakukan upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak parkir pada DPPK Kab. Bandung. Adapun langkah-langkah yaitu dengan melakukan hal-hal adalah :

1. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis.
2. Membuat peraturan daerah yang didalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan.
3. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan pajak parkir dan pendapatan asli daerah.

4.2 Pembahasan

Pada point ini penulis akan membahas mengenai analisis efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dan hambatan dan upaya untuk pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, hal ini dapat berjalan dengan baik bila ada sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaannya satu diantaranya dari sektor pajak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut DPPK Kab. Bandung yang diberi wewenang dalam pemungutan pajak yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan daerah. Rencana tersebut terbukti dapat memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan adanya laporan target dan realisasi penerimaan DPPK Kab. Bandung tahun 2005-2009 tentang efektivitas penerimaan pajak parkir dengan menggunakan tingkat efektivitas yang dapat diformulakan. Dimana efektivitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dibawah ini tabel 4.5 menggambarkan perhitungan efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Dari tabel 4.5, dapat dilihat realiasasi pajak parkir yang menjadi sumber pendapatan daerah pada DPPK Kab. Bandung yang menunjukkan bahwa pajak daerah salah satunya pajak parkir mempunyai peranan yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Efektivitas pajak parkir di dapat dari hasil realisasi pajak parkir dibagi dengan target yang telah ditetapkan dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

Dari hasil perhitungan dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 penerimaan pajak parkir hanya mencapai Rp 16.319.900; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000; dan tingkat efektivitas hanya mencapai 54,40% dengan kata lain penerimaan pajak parkir pada tahun 2005 dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir masih sedikit.
2. Pada tahun 2006 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 34.097.900; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 26.963.000; dengan tingkat efektivitas 126,46% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2006 dapat dikatakan sangat efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah.
3. Pada tahun 2007 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 32.774.500; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 30.350.000; dengan tingkat efektivitas 107,99% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2007 dapat dikatakan sangat efektif karena wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
4. Pada tahun 2008 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 76.244.400; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 30.000.000; dengan tingkat efektivitas 254,08% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif

karena jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

5. Pada tahun 2009 penerimaan pajak parkir melebihi target dan mencapai Rp 136.716.942; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 50.000.000; dengan tingkat efektivitas 273,43% sehingga penerimaan pajak parkir pada tahun 2009 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah, pengguna lahan pakir meningkat serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dikatakan baik karena setiap tahunnya selalu meningkat yang mengakibatkan penerimaan pajak dan penerimaan pendapatan asli daerah semakin optimal. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan tingkat efektivitas pajak parkir, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.1.

Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya pada DPPK Kab. Bandung dapat dilihat melalui tabel 4.6.

Dari tabel 4.6, dapat dilihat penerimaan pendapatan asli daerah pada DPPK Kab.. Bandung yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan asli daerah di dapat dari hasil realisasi PAD dinagi target PAD dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

Dari hasil perhitungan dapat diperoleh keterangan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 penerimaan pendapatan asli daerah hanya mencapai Rp 108.322.354.701,61; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 136.331.928.000,00; dan tingkat efektivitas hanya mencapai 79,45% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2005 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir masih sedikit.
2. Pada tahun 2006 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 137.532.499.196,23; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 136.408.772.000,00; dengan tingkat efektivitas 100,82% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2006 terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan efektif dikarenakan kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat untuk membayar pajak terutangnya.
3. Pada tahun 2007 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 147.630.987.490,05; dengan target yang telah ditaikan pada tahun 2006 menjadi Rp 152.407.266.000,00; dengan tingkat efektivitas 96,87% dengan kata lain target pendapatan asli daerah pada tahun 2007 tidak terealisasi dengan baik dan dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan kurangnya perluasan potensi dari wajib pajak parkir yang masih sedikit.
4. Pada tahun 2008 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 144.660.409.277,08; dengan target yang telah diturunkan dari tahun 2007 menjadi Rp

139.548.784.293,00; dengan tingkat efektivitas 103,66% sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2008 dapat dikatakan sangat efektif karena jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya semakin meningkat.

5. Pada tahun 2009 penerimaan pendapatan asli daerah melebihi target dan mencapai Rp 152.549.655.824,00; dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 151.496.194.500,00; dengan tingkat efektivitas 100,70% sehingga penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dapat dikatakan efektif karena jumlah wajib pajak yang menyediakan lahan parkir bertambah, pengguna lahan pakir meningkat serta wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah dikatakan cukup karena setiap tahunnya tidak menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber pajak daerah yang lainnya. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan tingkat efektivitas PAD, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.2.

4.2.2 Analisis Kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Apabila telah terdapat realisasi pajak parkir dan realisasi Pendapatan Asli Daerah maka kita dapat melihat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung selama 5 tahun dari tahun anggaran 2005-2009.

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, dibawah ini akan ditampilkan tabel 4.7 tentang kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari tabel 4.7 dapat kita ketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus meningkat. Persentase pendapatan asli daerah didapat dari perhitungan penerimaan pajak parkir dibagi penerimaan pendapatan asli daerah dikalikan 100%, dapat dilihat perhitungan dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

Dari hasil perhitungan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2005 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,50% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 16.319.900.
2. Pada tahun 2006 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dari tahun 2005 dan meningkat sebesar 2,47% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 34.097.900. Ini karena adanya para penyedia lahan parkir yang semakin meningkat.

3. Pada tahun 2007 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah menurun dari tahun 2006 menjadi 2,22% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 32.774.500. Ini karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.
4. Pada tahun 2008 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah meningkat kembali dari tahun 2007 menjadi 5,27% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 76.244.400. Ini karena meningkatnya kesadaran dari wajib pajak sendiri untuk membayar pajak parkir.
5. Pada tahun 2009 kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dari tahun 2008 dan meningkat sebesar 8,96% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 136.716.942. Ini karena bertambahnya penyedia lahan parkir atau wajib pajak dan bertambahnya pula pengguna lahan parkir.

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap PAD dikatakan baik karena dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang optimal dan menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik terus dari tahun ke tahun. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan atau penurunan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, maka penulis menggambarkannya dalam bentuk grafik pada gambar 4.3.

4.2.3 Analisis Hambatan yang dihadapi dalam penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Hambatan yang terjadi dalam melaksanaan kegiatan sumber pendapatan daerah yang dilakukan oleh DPPK Kab. Bandung mengalami hambatan khususnya dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir, adapun hambatan yang dihadapi adalah :

1. Terdapatnya target pajak parkir PAD yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.
2. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir maupun realisasi pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan.
3. Belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di pinggir badan jalan.
4. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.

Hal ini menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah maka diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hambatan yang ada pada DPPK Kab. Bandung.

4.2.4 Analisis Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Dengan ini Pemerintah Daerah harus melakukan upaya yang positif dalam peningkatan penerimaan pajak khususnya dari sektor pajak parkir pada DPPK Kab. Bandung. Adapun langkah-langkahnya yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi.
2. Membuat peraturan daerah yang didalamnya menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan yang bertujuan utnu meningkatkan penerimaan pajak parkir.
3. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan pajak parkir dan pendapatan asli daerah dengan cara :
    a. Mengidentifikasi pembayar pajak yang baru maupun jumlah pembayar yang telah ada.
    b. Memperbaiki basis data objek dan subjek pajak, melalui pemutahiran data lapangan.
    c. Memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan/kantor terhadap wajib pajak.
    d. Menghitung kapasitas penerimaan, untuk menentukan target pajak yang realistis.

Dengan upaya tersebut terbukti dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada bahkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut karena penerimaan pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sehingga penerimaan pajak parkir dan kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kab. Bandung dapat dikatakan optimal.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Penerimaan pajak parkir dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya baik penerimaan pajak parkir maupun kontribusinya selalu meningkat. Tetapi penerimaan pendapatan asli daerah dapat dikatakan kurang efektif karena setiap tahunnya tidak menunjukan *progress* dalam artian berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan karena belum optimalnya sumber pajak daerah yang lainnya.
2. Hambatan yang dihadapi adalah target pajak parkir yang ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya serta ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan yang sudah dilakukan, dan belum adanya peraturan daerah yang menetapkan sanksi apabila parkir di sembarang pinggir badan jalan. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak masih rendah dan belum sepenuhnya optimal. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut yaitu memeriksa kembali antara target pajak parkir dan potensi yang ada, menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi, memperluas penerimaan pajak dan membuat peraturan daerah dengan menetapkan sanksi dalam meningkatkan pengawasan. Dengan upaya tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir.

5.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan uraian dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran :

1. Harus adanya koordinasi yang baik antara wajib pajak dan petugas pajak.
2. Perlu perhitungan potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu mengingat potensi pajak parkir senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.
3. Dilakukan proses pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah ada, melalui kegiatan pemantauan dan pengendalian atas seluruh proses pemungutan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Umum Pikiran Rakyat. 2008. *PAD Kab. Bandung Tak Mencapai Target*. Edisi Selasa, 8 April 2008.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis,* Yogyakarta : BPFE-YOGYAKARTA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang *Pajak Parkir*. Soreang : 2008.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siahaan, Marihot.P. 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabetis.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

www.bandungkab.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel (pada halaman 11)

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. **Djamu Kertabudi (2007:28)**	1. Penerimaan Pajak Parkir tahun 2005-2009. 2. Penerimaan PAD tahun 2005-2009. 3. Kontribusi Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2005-2009. **Djamu Kertabudi (2007:52)**	Rasio

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Parkir pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009 (pada halaman 12)

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	%
1	2005	30.000.000	16.319.900	54,40
2	2006	26.963.000	34.097.900	126,46
3	2007	30.350.000	32.774.500	107,99
4	2008	30.000.000	76.244.400	254,08
5	2009	50.000.000	136.716.942	273,43

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Tabel 4.2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009 (pada halaman 12)

No	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1	2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45
2	2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82
3	2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87
4	2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66
5	2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2005-2009 (pada halaman 12)

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Parkir (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2005	16.319.900	108.322.354.701,61	1,50
2	2006	34.097.900	137.532.499.196,23	2,47
3	2007	32.774.500	147.630.987.490,05	2,22
4	2008	76.244.400	144.660.409.277,08	5,27
5	2009	136.716.942	152.549.655.824,00	8,96

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Tabel 4.4
Formula Efektivitas (pada halaman 13)

No	Persentase Efektivitas	Kriteria	Formula
1	100%	Sangat Efektif	Efektivitas = Realisasi Pajak / Target Pajak
2	100%	Efektif/Stabil	
3	< 100%	Tidak Efektif	

Sumber : Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2007

Tabel 4.5
Tingkat Efektivitas Pajak Parkir pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun 2005-2009 (pada halaman 13)

Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Persentase Efektivitas (%)	Ket	Tingkat Efektivitas
2005	30.000.000	16.319.900	54,40	↓	Tidak Efektif
2006	26.963.000	34.097.900	126,46	↑	Sangat Efektif
2007	30.350.000	32.774.500	107,99	↓	Sangat Efektif
2008	30.000.000	76.244.400	254,08	↑	Sangat Efektif
2009	50.000.000	136.716.942	273,43	↑	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Tabel 4.6
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005-2009 (pada halaman 14)

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Ket	Tingkat Efektivitas
2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45	↓	Tidak Efektif
2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82	↑	Efektif
2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87	↓	Tidak Efektif
2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66	↑	Sangat Efektif
2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70	↓	Efektif

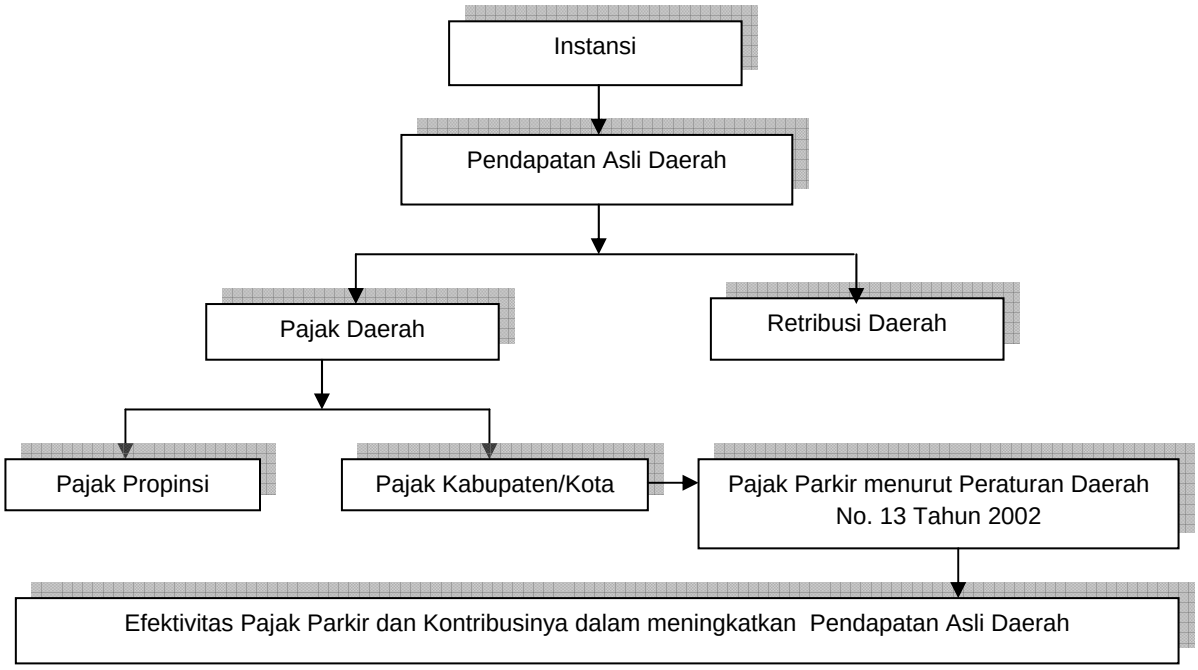
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Tabel 4.7
Hasil Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2005-2009 (pada halaman 15)

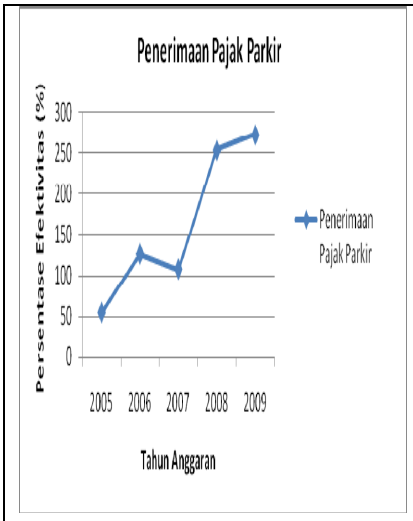
Tahun	Penerimaan Pajak Parkir	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)	Ket
2005	16.319.900	108.322.354.701,61	1,50	↓
2006	34.097.900	137.532.499.196,23	2,47	↑
2007	32.774.500	147.630.987.490,05	2,22	↓
2008	76.244.400	144.660.409.277,08	5,27	↑
2009	136.716.942	152.549.655.824,00	8,96	↑

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

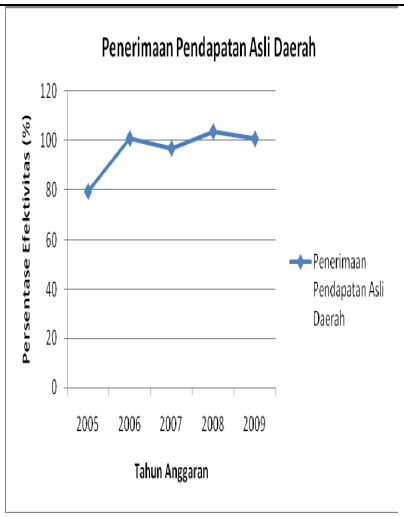
DAFTAR GAMBAR



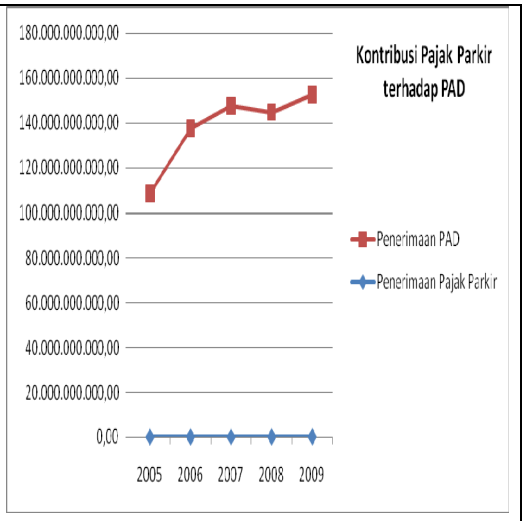
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran (pada halaman 8)



Gambar 4.1
Grafik Penerimaan Pajak Parkir (pada halaman 14)



Gambar 4.2
Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (pada halaman 15)



Gambar 4.3
Grafik Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (pada halaman 16)